

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah peneliti mengkaji dan menganalisis subjek dan objek penelitian, kemudian membandingkan teori/konsep yang dikutip untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara teori-teori tersebut. Peneliti akan menggunakan beberapa Landasan Teori/Konsep untuk menentukan masing-masing variabel yang diteliti, dengan mengumpulkan referensi dari berbagai sumber.

2.1.1 Teori Ilmu Pertahanan

Supriyatno telah mendefinisikan tentang ilmu pertahanan yaitu, “suatu ilmu dan seni yang mempelajari sumber daya manusia (*potential national resources*) yang dimiliki suatu negara untuk dijadikan sebagai kekuatan nasional (*national power*) pada saat damai, digunakan pada saat perang (konflik bersenjata), dan pada saat sesudah perang, guna menghadapi ancaman dari luar dan dari dalam negeri, baik berupa ancaman militer dan non-militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan keamanan nasional” (Octavian, 2021).

Pertahanan merupakan wajah yang dapat dikenali dari suatu negara (Eppler, 2009). Pandangan Eppler diilhami oleh pemikiran sosiolog klasik Max Weber tentang negara dan kedaulatan dan keamanan nasional. Menurut Piliang (2004), realitas adalah semua kondisi, situasi, atau objek yang diyakini benar-benar ada di dunia kehidupan, sebagai lawan dari fiksi, halusinasi, dan halusinasi khayalan. Oleh karena itu, pertahanan merupakan kebutuhan nasional yang nyata dan telah menjadi kebutuhan utama sejak pengakuan kedaulatan nasional. Secara alamiah, pertahanan negara berkembang dan berkembang dalam kerangka sistem politik dalam kaitannya dengan kinerja fungsi pertahanan negara (Budiardjo, 2008 :58). Realitas sistem politik tumbuh, dipelihara, dan berkembang menjadi sistem politik unggul, itu membutuhkan landasan yang disebut teori.

Perspektif teori dan konsep dalam sebuah kajian yang isinya dalam rangka membangun dan mengembangkan sebuah ilmu adalah sebuah keniscayaan. Artinya syarat utama pengembangan suatu ilmu, antara lain dibangun atas landasan teori dan konsep yang relevan, begitu juga terhadap pengembangan ilmu pertahanan. Atas dasar

pemikiran itu, pembahasan teori dan konsep dapat ditemukan. perkembangan ilmu militer dan ilmu perang pada abad terkini, yaitu abad ke-21, lebih populer disebut sebagai perang informasi. Teori dan konsep yang terkait dengan perang informasi ini dipaparkan secara komprehensif oleh Libick (Gongora dan van Riekhoff, 2000) yang juga secara signifikan memberikan pengayaan akademik terhadap upaya pengembangan ilmu pertahanan. Pembahasan sejumlah karya tersebut yang merefleksikan teori dan konsep sebagai fondasi pengembangan ilmu pertahanan. Pertahanan yang pada hakikatnya berangkat dari perilaku negara atau *state behavior* secara teoritis dan konseptual dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cakupan pembahasan filsafat ilmu menitikberatkan pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, dan aksiologis sebagai inti dari filsafat ilmu. Kesimpulan bahwa secara teoritis dan konseptual, ilmu pertahanan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah perspektif filsafat terutama filsafat ilmu (Tippe, 2016).

2.1.2 Teori Strategi Pertahanan

Secara etimologis, strategi berasal dari Bahasa Yunani “strategos” yang merupakan gabungan dari kata “stratos” (militer) dan “ag” (memimpin), sehingga kata strategos dapat dimaknai sebagai kepemimpinan, atau berbagai hal yang dilakukan oleh para pemimpin (perang) untuk dapat mencapai kemenangan dalam peperangan yang dilaksanakan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa istilah strategi pada dasarnya merupakan istilah yang identik dengan dunia militer (Yunus, 2016).

Strategi Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersifat defensif aktif yang mengandung pengertian bahwa pertahanan negara tidak ditujukan untuk melancarkan agresi terhadap negara lain, namun secara aktif menangkal, mencegah dan mengatasi segala bentuk ancaman yang ditujukan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Strategi pertahanan negara disusun untuk menghadapi segala ancaman terhadap pertahanan negara baik yang bersifat militer maupun non militer sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, “salah satu prinsip dasar penyusunan pertahanan negara adalah memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai Negara kepulauan”.

Strategi telah didefinisikan sebagai "penggunaan pertempuran sebagai sarana menuju pencapaian objek perang". Dengan itu membenarkan tidak ada hubungannya dengan apa pun kecuali pertempuran, tetapi teorinya harus memasukkan dalam pertimbangan instrumen aktivitas nyata ini pada angkatan bersenjata, dalam dirinya sendiri dan dalam hubungan utamanya, karena pertempuran diperjuangkan olehnya, dan menunjukkan kemampuannya. Efek pada gilirannya harus mengetahui dengan baik pertempuran itu sendiri sejauh berhubungan dengan hasil-hasilnya yang mungkin, dan kekuatan-kekuatan mental dan moral yang paling penting dalam penggunaan yang sama.

2.1.3. Sinergitas

Sinergitas atau sinergi berasal dari bahasa Inggris, *Sinergy*, yang diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan operasi gabungan. Sinergitas atau sinergi merupakan hal yang sama, istilah sinergi diartikan sebagai kegiatan kelompok ataupun individu-individu yang berbeda latar belakang untuk menyesuaikan kinerja agar mencapai tujuan. Hampden-Turner dalam Irwanda menyatakan bahwa kegiatan sinergi merupakan suatu tindakan yang melibatkan segala aktivitas, kegiatan tersebut akan beriringan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru (Firmansyah, 2016).

Lebih lanjut Hampden-Turner menegaskan bahwa sinergi merupakan hasil dari relasi dialogik antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan. Dengan demikian, Hartanto mengartikan sinergi adalah suatu gagasan baru yang terbentuk dari berbagai macam gagasan yang diajukan oleh banyak pihak hingga menghasilkan gagasan (kebijakan) baru. Oleh karena itu sinergitas diartikan oleh Najianti dalam Rahmawati et al sinergitas merupakan kombinasi atau paduan unsur/bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar ketika dibangun secara baik bersama stakeholders yang ada didalamnya. Dengan tujuan untuk membangun masyarakat atas kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi pemikiran-pemikiran yang rasional, terbuka dan demokratis. Silalahi menegaskan sinergi juga membutuhkan koordinasi untuk menyesuaikan kegiatan, baik yang dilakukan individu-individu maupun unit-unit dalam suatu kelompok untuk mencapai ke arah yang sama. Begitu pun dengan Pandu Dwinugraha menyatakan berdasarkan dari konsep keilmuan administrasi publik, bahwa konsep sinergitas merupakan suatu cara yang dilakukan pemerintah demi mencapai

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian terdapat indikator dalam pelaksanaan sinergitas untuk mencapai jaminan kesehatan semesta, dengan sinergitas, maka yang hubungan antar aktor dalam mencapai kepentingan bersama dapat diwujudkan. Menurut Najjanti, terdapat dua cara untuk mencapai sinergitas, yaitu : komunikasi dan koordinasi:

1. Komunikasi, menjelaskan bahwa komunikasi terdapat dua bagian, komunikasi yang bersumber dengan awalnya menyatakan bahwa kegiatan dimana seorang secara sungguh-sungguh memindahkan stimulan guna mendapatkan tanggapan. Setelah itu komunikasi yang berorientas pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus.

2. Koordinasi, merupakan untuk mencapai sinergitas dibutuhkan dalam koordinasi antar aktor. Lebih lanjut, Silalahi menyampaikan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan- kegiatan individual dan unit-unit dalam satu usaha bersama yaitu berkerja kearah tujuan bersama (Silalahi, 2011).

Begitupun dengan Triana Rahmawati dkk, Ia menjelaskan sinergitas dapat dilalui dengan dua cara : komunikasi dan koordinasi. Cara menghasilkan sinergi, maka harus menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik. Karena sinergi dapat terjadi apabila koordinasi dan komunikasi ada pada dua aktor bahkan lebih dalam mewujudkan tujuan bersama itu (Rahmawati, 2014). Begitupun dengan Mulyana dalam Irwanda menyampaikan sinergitas dapat dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi. Menurut Mulyanan koordinasi diperlukan terkait hubungan antara stakeholder baik secara vertical, horizontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan. Sedangkan komunikasi adalah pertukaran informasi yang melibatkan berbagai pihak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sinergitas adalah kondisi yang menghubungkan antara actor dalam mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama tersebut dapat tercapai apabila sinergitas tersebut dapat mencantumkan koordinasi dan komunikasi sebagai langkah menggapai tujuan tersebut.

2.1.4 Teori Pembangunan

Pembangunan mempunyai pengertian dinamis, maka tidak boleh dilihat dari konsep yang statis. Pembangunan juga mengandung orientasi dan kegiatan yang tanpa akhir. Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Pembangunan tidak bersifat top-down, tetapi tergantung dengan “innerwill”, proses emansipasi diri. Dengan demikian, partisipasi aktif dan kreatif dalam proses pembangunan hanya mungkin bila terjadi karena proses pendewasaan. Kecenderungan globalisasi dan regionalisasi membawa sekaligus tantangan dan peluang baru bagi proses pembangunan di Indonesia. Dalam era seperti ini, kondisi persaingan antar pelaku ekonomi (badan usaha dan/atau negara) akan semakin tajam. Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam ini, tiap pelaku ekonomi (tanpa kecuali) dituntut menerapkan dan mengimplementasikan secara efisien dan efektif strategi bersaing yang tepat (Kuncoro, 2004).

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Pengertian pembangunan, menurut para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya (Digdowiseiso, 2019)

2.1.5 Teori Implementasi Kebijakan Geogre Edward III

Implementasi Kebijakan George Edward III Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) (Edward dalam Widodo, 2007:96-110).

- a) Komunikasi Menurut Edward III dalam Widodo (2007:97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2007:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran

kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2007:97) komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi antara lain dimensi transmisi, kejelasan dan konsistensi.

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target group dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b) Sumber daya Edward III dalam Widodo (2007:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2007:98) bahwa sumber daya tersebut meliputi :

- 1) Sumber daya manusia
- 2) Sumber daya anggaran
- 3) Sumber daya peralatan
- 4) Sumber daya kewenangan

c) Disposisi Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2007:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan, kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2007:104-105) menyatakan bahwa : Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus

dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

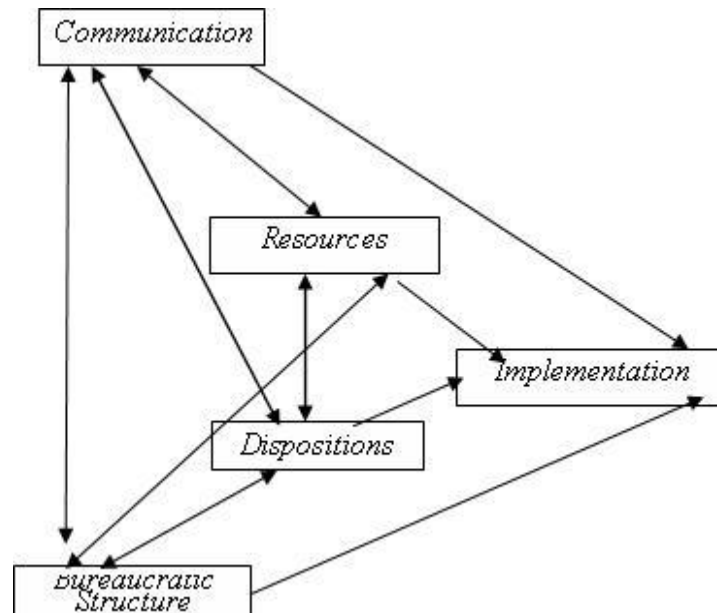
- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan- hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d) Struktur Birokrasi Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2007) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat yaitu :

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik.
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hirarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yg mati.

6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh pihak luar. Meskipun sumber - sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2007:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2007:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan hubungan antar unit-unit organisasi dan sebagainya.

Secara skematis, model implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Model implementasi kebijakan menurut Edward III

Sumber: (Agustino, 2008)

2.1.6 Teori Pembagian Kekuasaan

Secara teoritis dikenal dua pola pembagian kekuasaan negara yaitu pembagian Kekuasaan negara secara horisontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan negara secara horisontal adalah pembagian kekuasaan negara kepada organ utama negara yang dalam ketatanegaraan disebut Lembaga Negara. Ada beberapa teori yang membahas masalah ini diantaranya adalah dari John Locke dan

Montesqueu. Sementara itu yang dimaksud dengan Pembagian kekuasaan negara secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Hadjon). Dalam konteks hubungan pusat dan daerah, sudah tentu yang relevan untuk dibahas dalam tulisan ini adalah pembagian kekuasaan negara secara vertikal. Pembagian kekuasaan negara pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara atau pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Demikian pula halnya pembagian kekuasaan secara vertikal pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah (pusat) terhadap pemerintahan daerah. Dengan kata lain tanpa pembagian kekuasaan secara vertikal tidak mungkin kesewenang-wenangan pemerintah pusat terhadap daerah dapat dicegah. Tanpa pembagian kekuasaan negara secara vertikal tidak mungkin ada pemerintahan daerah otonom, yang berarti tidak ada penyerahan kewenangan dari pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi). Dengan kata lain penyerahan kewenangan itu terjadi karena adanya pembagian kekuasaan secara vertikal.

Dengan penyerahan kewenangan itu berarti Pusat membatasi (dibatasi) kekuasaannya untuk tidak lagi mengatur dan mengurus kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah otonom tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kehadiran lembaga pemerintahan tingkat daerah (desentralisasi) ini sangat diperlukan. Alexis de Tocqueville berpendapat bahwa kehadiran lembaga pemerintahan tingkat daerah tidak dapat dipisahkan dari semangat kebebasan : “a nation may establish a system of free government but without a spirit municipal institutions it can not have the spirit of liberty” (Bagir Manan, 1994). Kebebasan merupakan salah satu karakteristik kedaulatan rakyat. Dengan demikian suatu pemerintahan yang merdeka tetapi tanpa disertai oleh semangat untuk membangun lembaga pemerintahan tingkat daerah tidaklah akan mempunyai semangat kebebasan. Salah satu alasan dianutnya desentralisasi adalah untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani (Gie, 1968)

2.1.7 Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. (Abe, 2005:27)

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Menurut Hasibuan (dalam Syafie, 2007:49) rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik di negara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Berdasarkan definisi-definisi yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumberdaya yang tersedia (uin.suska, 2018)

2.1.8 Lingkungan Operasi Maritim

Sebuah lingkungan yang dimulai dimana gelombang laut menghantam area pantai mencakup bagian daratan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi aktivitas langsung di laut dan dapat menciptakan efek di darat. Suatu lingkungan yang tidak terbatas pada laut tetapi juga mencakup zona litoral yang mengarah ke darat. Istilah litoral sering digunakan tetapi tidak selalu didefinisikan atau dipahami dengan benar. Dalam definisi

yang paling sederhana, littoral berarti “wilayah pesisir”. Littoral meliputi wilayah yang berbatasan dengan perairan laut tepi terbuka, kepulauan besar, serta laut tertutup dan setengah tertutup. Pesisir yang berbatasan dengan laut terbuka, seperti pantai Amerika Utara dan Selatan, Afrika, dan India memanjang keluar dari garis pantai ke titik yang menandai batas terjauh landas kontinen. Lebar landas kontinen dapat bervariasi mulai kurang dari 100 mil di lepas pantai barat Amerika Utara dan Selatan hingga hampir 800 mil dari pantai Arktik Amerika Utara dan Eurasia. Oleh karena itu, jauh lebih sulit untuk bermanuver secara senyap dan membuat kejutan atau untuk memastikan perlindungan terhadap serangan musuh, terutama dari serangan udara. Perang di laut dilakukan di permukaan, di bawah permukaan dan juga di udara, sedangkan perang di darat lebih bersifat dua dimensi. Di darat, pasukan lawan beroperasi di wilayah yang pada dasarnya sama.

Dengan ukuran yang besar dan sebagai kesatuan air, menjadikan lautan sebagai jalan raya yang memiliki implikasi penting bagi operasi militer, rute penting yang menawarkan kapal-kapal angkatan laut untuk bermanuver dalam skala global sekaligus bertindak sebagai penghalang bagi mereka yang tidak dapat menggunakan laut. Laut juga penting untuk kegiatan konektivitas ekonomi laut dalam kapasitas sebagai alat transportasi massal dalam pelayaran. Aspek geografis akan terus memberikan konteks spasial di mana peperangan laut terjadi. Karakteristik permukaan laut yang meliputi lokasi, jarak, konfigurasi fisik, kondisi permukaan, pasang surut dan arus. Kedalaman, topografi dasar, sifat air laut dan kehidupan laut adalah karakteristik yang berkaitan dengan area bawah permukaan laut. Relatif kecil untuk mengetahui topografi dasar laut karena baru sepuluh persen dari dasar laut yang dapat dipetakan yang sebagian besar berada di zona pesisir. Karakteristik geografis fisik lingkungan pesisir adalah lingkungan yang sangat kompleks di mana 30 faktor utama (arus, terumbu, tingkat salinitas dan gradien dan lain sebagainya) dapat secara meyakinkan mempengaruhi hasil operasi sehingga menjadi tantangan bagi angkatan laut dalam menjalankan operasinya dan memberikan pengaruh langsung pada strategi, taktik, logistik, persenjataan, pengembangan struktur kekuatan dan desain kapal angkatan laut (Sutanto, 2022)

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan penting dalam penelitian selanjutnya sebagai pembanding dan menjaga orisinalitas penyusunan penelitian. Penulis menggunakan hasil dari penelitian terdahulu baik dalam kerangka metologi, teori, pembahasan analisa, hingga temuannya sebagai bahan yang dapat mendukung penelitian ini.

- a. Yunianto dalam penelitiannya di Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta, dengan judul Kerja Sama Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda dan Bandar Udara Internasional Juanda dalam Mendukung Sistem Pertahanan Semesta. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda yang sejak awal dibangun sebagai pangkalan induk penerbangan Angkatan Laut, dalam perkembangannya dimanfaatkan bersama oleh PT Angkasa Pura I digunakan sebagai Bandara Internasional yang melayani penerbangan pesawat komersial rute domestik maupun internasional. Pada Kondisi damai, keberadaan Bandara Internasional Juanda berlaku enclave sipil (dalam kantong sipil) dan pengelolaannya berlaku regulasi sipil. Sedangkan dalam kondisi darurat militer atau perang, akan berubah menjadi enclave militer (dalam kantong militer), sehingga kewenangan pengelolaan Bandara tersebut berlaku regulasi dan hukum militer beserta kepentingan militer lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa kerja sama antara Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut dan Bandar Udara Internasional Juanda sebagai komponen pertahanan dalam mendukung sistem pertahanan semesta (Yunianto, 2017).
- b. Joshua Banjarnahor dalam penelitiannya di Jurnal.um-tapsel, dengan judul Implementasi Sinergitas Lembaga Pemerintah Untuk Mendukung Budaya Sadar Bencana di Kota Balikpapan. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana diperlukan suatu cara untuk menumbuhkan budaya sadar bencana di masyarakat, khususnya di Kota Balikpapan. Guna menumbuhkan budaya sadar bencana tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai Lembaga pemerintah di Kota Balikpapan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberi gambaran kesadaran masyarakat dalam memahami

bencana dan implementasi dari sinergitas lembaga pemerintah dalam rangka menumbuhkan budaya sadar bencana di Kota Balikpapan (Joshua Banjarnahor, 2020).

- c. Endra Kusuma dalam penelitiannya di Jurnal Inovasi Penelitian, dengan judul Relevansi Peran Pangkalan TNI Angkatan Laut Terhadap Terwujudnya Wilayah Pertahanan yang Bertumbuh Pada Pulau – Pulau Besar. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III Jakarta sebagai satuan komando daerah memiliki peran dalam mempersiapkan yang tangguh, ruang, alat dan kondisi pertempuran dengan memberdayakan wilayah pertahanan laut melalui pembinaan potensi maritim (binpotmar) sebagai bagian dari Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN). Di dalamnya Dalam pelaksanaannya, pertahanan negara di laut harus mengikuti kebijakan pertahanan yang ditetapkan oleh negara. Saat ini, pemerintah telah meratifikasi kebijakan umum bela negara tahun 2020-2024 dengan salah satu kebijakannya sasarannya adalah terwujudnya wilayah pertahanan berbasis pulau-pulau besar. Dengan tekad ini kebijakan pertahanan negara, maka perlu dilakukan sinkronisasi terhadap SPLN yang telah dilakukan oleh TNI AL dengan salah satu sasaran strategis kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan antara pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui BinPotmar dan unsur-unsur dalam upaya mewujudkan wilayah pertahanan yang berbasis pulau-pulau besar (Endra Kusuma, 2021).

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti dan Jenis Tulisan	Hasil yang diteliti	Persamaan	Perbedaan
1	Kerja sama pangkalan udara TNI angkatan laut juanda dan Bandar udara	Kerja sama dilaksanakan oleh Puspenerbal sebagai pembina penerbangan TNI	Persamaan antara penelitian ini dan penelitian Bambang Yunianto adalah	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Bambang

	internasional juanda dalam mendukung sistem pertahanan Semesta. Bambang Yuniyanto (2017) Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta	AL dengan PT Angkasa Pura I maupun stakeholder lainnya melalui suatu perjanjian. Instansi yang memiliki kepentingan terhadap kebandarudaraan melakukan kerja sama yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengikat untuk melaksanakan fungsi pemerintahan maupun non pemerintahan.	adanya sinergitas antara pemerintah yang dimana untuk mendukung pertahanan Negara.	Yuniyanto terletak pada fokus penelitian. Peneliti akan memfokuskan ke sinergitas pemerintah pusat dan daerah Bengkulu dalam membangun lanudal sedangkan Bambang Yuniyanto adalah kerja sama pangkalan udara TNI angkatan laut juanda dan Bandar udara internasional.
2	Implementasi sinergitas lembaga pemerintah untuk mendukung budaya sadar	Lembaga Pemerintahan yang ada di Balikpapan, di antaranya ada BPBD Kota Balikpapan,	Persamaan antara penelitian ini dan penelitian Joshua Hayatul Sri adalah kesadaran dan sinergitas	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Joshua Hayatul Sri terletak pada fokus

	<p>bencana di kota Balikpapan.</p> <p>Joshua Hayatul Sri (2020) Jurnal.um-tapsel</p>	<p>Kodam VI/Mulawarman, BMKG Stasiun III Geofisika, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pencarian dan Pertolongan, Pangkalan TNI AL, Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, maupun Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Balikpapan memiliki sinergitas yang baik dalam menanggulangi kebencanaan yang ada di Kota Balikpapan dan sekitarnya.</p>	<p>pemerintah untuk kesiapagaan bilamana bencana akan terjadi dan untuk ketenangan dan keamanan masyarakat di supaya tercipta rasa aman damai dan tentram.</p>	<p>penelitiannya. Peneliti akan memfokuskan ke sinergi pemerintah pusat dan daerah Bengkulu dalam membangun lanudal sedangkan Joshua Hayatul Sri adalah implementasi sinergitas lembaga pemerintah untuk mendukung budaya sadar bencana.</p>
3	<p>Relevansi peran pangkalan TNI angkatan laut terhadap terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpuh pada</p>	<p>Relevansi pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui binpotmar yang dilaksanakan oleh Lantamal III Jakarta beserta</p>	<p>Persamaan antara penelitian ini dan penelitian Syaiful Anwar adalah penelitian yang sama - sama meneliti tentang</p>	<p>Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Endra Syaiful Helda Ruslan terletak pada fokus</p>

	<p>pulau – pulau besar. Endra Syaiful Helda Ruslan (2021) Jurnal Inovasi Penelitian</p>	<p>jajarannya di pulau Jawa memiliki keterkaitan terhadap upaya terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar. Kontribusi dari pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui binpotmar memiliki persamaan dengan elemen-elemen yang ingin dicapai dalam konsep wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar.</p>	<p>terwujudnya wilayah pertahanan.</p>	<p>penelitiannya. Peneliti memfokuskan pada sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam membangun lanudal, sedangkan Endra Syaiful Helda Ruslan fokus penelitiannya pada upaya relevansi peran pangkalan TNI angkatan laut.</p>
--	---	--	--	--

Sumber :Diolah peneliti, 2022

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sekaran (1992, sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2020, p.95) kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Tesis Universitas Pertahanan (2021)

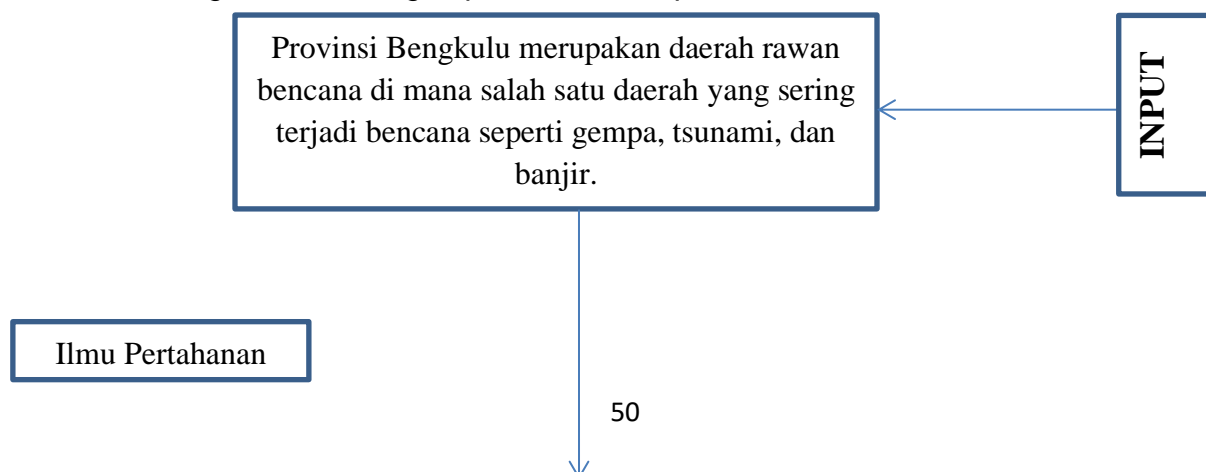
menjelaskan bahwa Kerangka pemikiran merupakan narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Pada dasarnya esensi kerangka pemikiran berisi alur jalan pikiran peneliti secara logis atau rangkaian penalaran dalam suatu kerangka penelitian mulai dari munculnya permasalahan, berbagai aspek termasuk teori yang berhubungan dengan masalah, proses analisis sampai dengan kesimpulan.

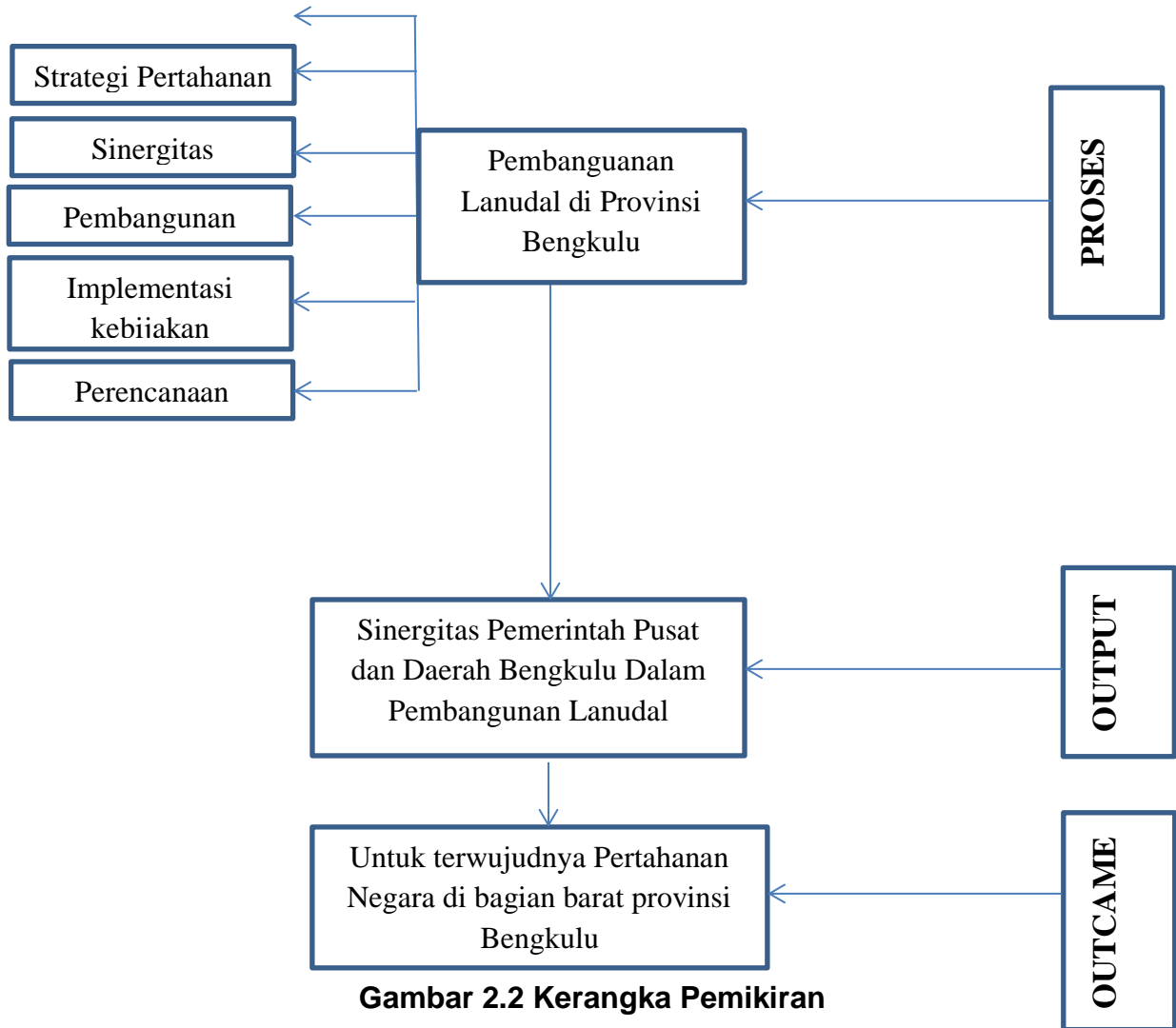
Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga kerangka pemikiran terletak pada fenomena, gejala atau kasus yang selama ini dilihat atau diamati langsung oleh peneliti. Input dalam penelitian ini menjelaskan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu Provinsi Bengkulu merupakan daerah rawan bencana di mana salah satu daerah yang sering terjadi bencana seperti gempa, tsunami, dan banjir.

Tahap proses merupakan tahap yang berkaitan dengan pembanguan lanudal di provinsi Bengkulu dengan menggunakan teori ilmu pertahanan, strategi pertahanan, sinergitas, pembangunan, implementasi kebijakan, dan perencanaan. Tahap selanjutnya menjelaskan mengenai output penelitian, yang dalam konteks penelitian ini adalah Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah Bengkulu Dalam Pembangunan Lanudal. Tahap terakhir, yaitu outcome menjelaskan hasil yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian, yang dalam konteks penelitian ini yaitu Untuk Mendukung Pertahanan Negara di Samudera Hindia.

Berikut ini gambar kerangka pemikiran dari penelitian ini :





Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
 Sumber: Diolah oleh Peneliti (2022)